

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Melihat pada terus terjadinya kekerasan terhadap kaum sipil pada saat pasukan perdamaian telah ditempatkan di daerah konflik, dapat disimpulkan bahwa peacekeeping operation yang dijalankan PBB serta Uni Afrika gagal dalam menekan eksklamasi konflik dan mewujudkan stabilitas keamanan di Darfur, terlihat pada diperpanjangnya mandat UNAMID untuk melakukan operasi perdamaian di Darfur hingga tahun 2009.

Meskipun keadaan *negative peace* sempat tercapai di Sudan pada tahun 2005 ketika *Comprehensive Peace Agreement* disepakati dan ditandatangani oleh pihak pemerintah dan kelompok pemberontak SPLA. Restrukturisasi pemerintah dengan memasukkan etnis Afrika kedalam badan pemerintahan Sudan dianggap mampu menyudahi perbedaan-perbedaan yang menjadi alasan bagi kedua pihak untuk memulai konflik. Namun kondisi *negative peace* ini tidak berlangsung lama karena baik SPLA maupun Janjaweed melanggar kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan tindak kekerasan kepada kaum sipil, bahkan pasukan Uni Afrika yang tergabung dalam AMIS turut menjadi sasaran dari kedua belah pihak.

Keadaan ini terus mewarnai perkembangan usaha perdamaian di Darfur dan Sudan. Tahun-tahun berikutnya hingga akhir tahun 2008, penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata masih terjadi. Perjanjian-perjanjian tambahan tetap diusahakan untuk diimplementasikan oleh peacekeeping operation PBB, namun progres berjalan lambat karena pasukan PBB belum mampu untuk membangun kepercayaan antar sesama pihak yang bertikai. Tidak hanya *confidence building*, beberapa hal lain juga menyebabkan peacekeeping operation PBB di Darfur tidak berjalan secara efektif dalam menghentikan konflik etnis tersebut.

Rendahnya inisiatif pemerintah Sudan untuk membantu jalannya operasi perdamaian di Darfur berakibat pada lamanya proses pelucutan senjata, karena pemerintah Sudan tidak dapat bertindak tegas terhadap Janjaweed dalam menekan kelompok bersenjata tersebut untuk segera menyerahkan peralatan milliternya

kepada pemerintah dengan pengawasan dari PBB. Tentu saja ini mempengaruhi rasa kepercayaan kelompok pemberontak SPLA untuk mendukung proses pelucutan senjata dengan serius. Ketidakmampuan pemerintah Sudan untuk mendukung operasi perdamaian yang dijalankan oleh PBB secara langsung mempengaruhi keseluruhan tujuan yang ingin dicapai oleh PBB.

Kurangnya sumber daya dan dana untuk melakukan operasi perdamaian juga memegang peranan penting dalam efektifitas pelaksanaannya. Negara-negara anggota PBB lainnya serta komunitas internasional masih terbilang kurang untuk menyokong kelangsungan *peacekeeping operation* PBB, baik untuk misi kemanusiaan maupun untuk misi perdamaian. Hal ini tentu menyulitkan mobilitas dan membatasi tindakan yang ingin dilakukan oleh para pasukan perdamaian yang ditempatkan di Darfur, baik oleh Uni Afrika maupun oleh PBB. Dalam hal ini PBB, sebagai organisasi internasional, seharusnya mampu mengajak negara-negara anggotanya dan komunitas internasional lainnya untuk turut bekerjasama didalam usaha PBB untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Negara-negara anggota dan komunitas internasional lainnya perlu ditekankan akan pentingnya perdamaian suatu negara bagi stabilitas internasional.

PBB dinilai kurang tepat dalam membiarkan Uni Afrika memimpin dalam operasi perdamaian di Darfur. Uni Afrika adalah organisasi regional internasional yang baru terbentuk pada tahun 2002, keterlibatan organisasi tersebut didalam *peacekeeping operation* baru sebatas pengiriman pasukan untuk memperkuat pasukan perdamaian yang telah ada. Akuntabilitas Uni Afrika masih diragukan oleh masyarakat Sudan. Seharusnya, PBB tetap memegang kendali keseluruhan *peacekeeping operation* dan tidak hanya sebatas mengirimkan tim monitoring sejak konflik semakin memanas di tahun 2004.

Lambatnya PBB dan Dewan Keamanan dalam membentuk suatu operasi perdamaian bagi Darfur serta membantu keseluruhan misi Uni Afrika telah memberikan kesempatan bagi konflik etnis tersebut untuk berkembang dan meluas. Jika melihat pada pembagian jenis *peacekeeping* menurut Bellamy, pada awal berlakunya PKO di Darfur, PBB hanya melakukan *traditional peacekeeping*. UNAMIS merupakan operasi perdamaian PBB pertama di Darfur, namun hanya memiliki mandat sebatas untuk memantau dan mengawasi jalannya proses

implementasi dari *Comprehensive Peace Agreement*. *Traditional peacekeeping* masih menganggap legitimasi tertinggi dipegang oleh pemerintah negara yang bersangkutan dan tidak dapat diganggu-gugat. Terbukti bahwa UNAMIS tidak memiliki sarana ataupun mandat tepat yang dapat bersifat menekan terhadap pemerintah Sudan.

UNAMIS dibentuk hanya untuk tujuan politis dalam menyiapkan dan mengawasi agar proses implementasi perjanjian yang telah disepakati mampu berjalan serta untuk memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang berkonflik terhadap *peace support operation* yang akan diikuti setelah penandatanganan CPA.

Akan lebih baik jika PBB dalam menyusun mandat UNAMIS, membentuk operasi perdamaian tersebut lebih mengarah ke jenis *wider peacekeeping*. *Peacekeeping* jenis ini lebih memiliki cakupan bidang operasi yang lebih luas seperti isu kemanusiaan dan memiliki persenjataan yang lebih memadai bagi kondisi konflik yang dihadapi. Konflik Darfur yang berkepanjangan juga menimbulkan masalah-masalah seputar isu kemanusiaan seperti HAM dan pengungsian. Tingginya serangan yang dilakukan oleh Janjaweed dan SPLA, juga menjadi resiko bagi para pasukan perdamaian yang ditempatkan di Darfur. Sehingga pasukan PBB yang tergabung didalam *peacekeeping operation* untuk Darfur hendaknya memiliki tingkat kesediaan persenjataan yang mampu untuk berfungsi sebagai alat perlindungan diri dan penjagaan menyeluruh bagi kaum sipil Sudan. Seperti yang dapat disimpulkan dari *The Brahimi Report*, bahwa para penjaga perdamaian harus dapat melaksanakan mandat mereka secara profesional agar dapat mencapai keberhasilan.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Bellamy, *wider peacekeeping* lazim menemui kesulitan dalam hal dana. Luasnya bidang operasi menyebabkan ada banyak pula tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh *peacekeeping* jenis ini. Hal ini juga berarti bahwa dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan suatu operasi dengan karakteristik yang dimiliki oleh *wider peacekeeping*, lebih besar daripada hanya menjalankan operasi *traditional peacekeeping*. Keterbatasan dana juga berpengaruh terhadap kelengkapan peralatan, transportasi serta logistik dari para pasukan perdamaian yang terbentuk.

Hal-hal yang secara singkat dijabarkan kembali oleh penulis diatas, saling bersinggungan dan berkaitan erat dengan jalannya suatu operasi perdamaian. Peranan PBB dalam keberhasilan suatu *peacekeeping operation* sangat penting, karena itu organisasi internasional tersebut harus mampu menyusun langkah-langkah dengan tepat yang meliputi: ketersediaan sumber daya, pendanaan yang baik dan memadai, pengumpulan pasukan perdamaian, strategi penyelesaian konflik yang akan dilakukan serta penyusunan mandat. Kesemuanya itu penting untuk dilakukan secara tepat agar operasi perdamaian yang dilakukan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diemban serta mampu mewujudkan stabilitas dan perdamaian.

